



**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019**



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- b. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4
10

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

† f a

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

t q c

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.

Pasal I






Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28) yang mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIKANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

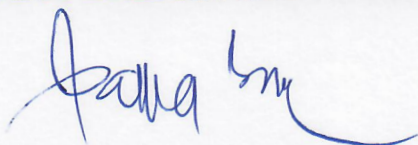
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020



Handwritten signature or initials.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah selesai kami susun.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2020 bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini mengacu pada Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun, sehingga bisa berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini diharapkan bisa terealisasi sehingga kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban visi dan misi untuk mewujudkan Kudus bangkit menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus di masa yang akan datang pada khususnya.

Y
16

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Sesuai peraturan diatas, terdapat beberapa perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi beberapa Bagian di Sekretariat Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 perlu diubah.

Adapun perubahan mendasar dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2020 sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018	Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019
Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi terdiri dari : 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Perlengkapan dan	Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Organisasi

f q u

Keuangan 3. Bagian Umum	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Bagian Umum
----------------------------	---

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

r Q 16

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

K J S

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

f d s

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dalam upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pada Sekretariat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. menyediakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah;
2. menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan;
3. sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. sinkronisasi substansi dokumen perubahan RKPD 2020.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang perubahan, landasan hukum, maksud, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Lalu.

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya (2019), memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun n-1 (2019). Format tabel 2.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

✶ 

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Bab ini memuat usulan dan revisi kegiatan perubahan. Format tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

Bab IV. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

+ f_h

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN LALU

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah memuat revidasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Kudus. Penyusunan perubahan rencana program/kegiatan tahun 2020 memperhatikan rencana capaian kinerja tahun 2019, pencapaian target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 serta realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebagai berikut:

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis SKPD pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung pada awal RKPD terdiri dari 8 program 18 kegiatan. Realisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata Pemerintahan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 4.027.000,- (80,55%), sedangkan realisasi output/fisik adalah 1 dokumen;

1.2 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 152.928.000,- (84,16%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 23.129.000,- (77,1%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Fasilitasi Tata Pemerintahan;

1.1. Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 76.086.000,- (93,41%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

f q u

1.2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 153.398.000,- (74,83%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

b. Bagian Hukum

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 72.060.000,- (81,55 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 21.301.000,- (41,62 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Penegakan HAM :

2.1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 121.056.000,- (75,55%), sedangkan realisasi fisik mencapai 386,15%;

2.2 Kegiatan Pengkajian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 93.044.000,- (73,18%), sedangkan realisasi fisik mencapai 50,66 %; dan

2.3 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 315.702.000,- (77,77%), sedangkan realisasi fisik mencapai 57,14%.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 242.000,- (11,52%), sedangkan realisasi output/fisik adalah 2 dokumen;

- 1.2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 138.313.000,- (75,56%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan
- 1.3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp.44.808.000,- (81,81%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat :

- 2.1. Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 180.592.000,- (79,61%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan
- 2.2. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 1.646.752.000,- (81,84%), realisasi fisik mencapai 100%.

d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

- 1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 127.043.000,- (93,07 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %; dan
- 1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Sarpras Aparatur.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp145.468.000,- (87,73 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa :

- 2.1. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang /Jasa.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 169.360.000,- (92,55 %) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

* 4/10

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 883.773.000,- (93,03 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

e. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 88.679.000,- (90,85 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 31.630.000,- (57,2 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 107.243.000,- (97,49 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

2.2. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 78.016.000,- (78,02 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

f. Bagian Organisasi

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 153.427.000,- (95,75%), sedangkan realisasi fisik mencapai 66,67 %;

1.2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 190.118.000,- (94,42%), sedangkan realisasi mencapai 100%; dan

- 1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.
Realisasi keuangan sampai Triwulan IV adalah Rp. 48.986.000,- (79,39%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%.
2. Program Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi :
 - 2.1. Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 270.560.000,- (77,3%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
 - 2.2. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 186.613.000,- (76,26%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan
 - 2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Reformasi Birokrasi.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 16.515.000,- (82,57%), sedangkan realisasi fisik 0 %.

g. Bagian Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 1.093.176.000,- (70,6%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan
 - 1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dan Sarana Prasarana Aparatur.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 6.227.935.000,- (71,69%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :
 - 2.1. Kegiatan Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp 1.639.216.000,- (80,78%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

✓

h. Bagian Perlengkapan dan Keuangan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 2.036.517.000,- (84,38%), sedangkan realisasi fisik mencapai 75%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 9.358.845.000,- (88,38%), sedangkan realisasi fisik mencapai 75%.

Penjelasan dan narasi di atas akan dituangkan dalam tabel 2.1.

K
D
K

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Hasil Kerja Peningkat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
Periode Pelaksanaan : 2019

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)		Realisasi Capaian Kerja Rencana OPD s/d Rencana OPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja OPD yang direalisasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja yang direalisasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rencana SKPD)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2018 (%)						
			K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	Program pada Setiap SKPD																						
1	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		1.018.647	0	0	0	0	0	66,92	145.029	16,2	35.086	83,1	180.084	83,1	180.084	0	17,68				
1.1	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Renja - Tercapainya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	5 Dok	15.000	-	1.115	1	1.360	-	890	-	-	663	1	4.027	100	80,55	1	4.027	20	25,85		
1.2	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tercapainya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bln	853.647	-	12 Bln	3	38.422	3	22.924	3	67.844	3	23.738	12	152.928	100	84,16	12	152.928	100	17,91	
1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana	- Tercapainya sumber dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Bln	150.000	-	12 Bln	3	2.901	3	2.380	3	7.192	3	10.556	12	23.129	100	77,1	12	23.129	100	15,42	
Realisasi - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja: Sangat Tinggi																							
2	Program Realisasi Tata Pemerintahan	Prosentase Analisa Kebijakan		1.243.227	0	0	0	0	0	85,81	188.434	24,8	71.051	80,11	229.484	80,11	229.484	0	19,46				
2.1	Fasilitas Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Perencanaan Keuangan Kerja, Rapor, Kerja prarubah wilayah dan evaluasi kinerja kecamatan	100 %	458.227	-	12 Bln	3	916	3	25.918	3	17.227	3	32.025	12	76.086	100	93,41	12	76.086	12	16,6	
2.2	Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	- Tercapainya penyelenggaraan LPPD di media masa, laporan pelaksanaan kerjanya daerah, dokumentasi LPPD	100 %	785.000	-	12 Bln	3	11.316	3	36.176	3	66.881	3	39.026	12	153.398	100	74,83	12	153.398	12	19,44	
Realisasi - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja: Sangat Tinggi																							
Predikat Kinerja: Sangat Tinggi																							
Program pada Setiap SKPD																							
1	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		676.470	0	0	0	0	0	47,71	66.577	19,2	26.784	66,9	93.361	66,9	93.361	0	13,8				
1.1	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tercapainya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	60 Bln	442.030	12	88.360	12 Bln	3	15.637	3	13.255	3	22.470	3	20.099	12	72.060	100	81,55	24	160.420	40	36,29
1.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	- Tercapainya Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	60 Bln	234.440	12	51.184	12 Bln	3	3.261	3	4.940	3	7.014	3	6.086	12	21.301	100	41,62	24	72.485	40	30,92
Realisasi - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja: Sangat Tinggi																							
Predikat Kinerja: Sangat Rendah																							
Administrasi Pemerintahan																							
136.544																							

Handwritten mark

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2019) yang divaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang divaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD yang divaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Rencana OPD s/d 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Rencana OPD s/d Tahun 2018 (%))	Ket																
				K	Rp.		I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10												
2.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Keputusan HAM	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan kasus pidana	650 Dant	K	Rp. 801.420	130 Dant	K	Rp. 160.230	130 Dant	K	Rp. 160.230	52	K	Rp. 36.117	46	K	Rp. 1.119	180	K	Rp. 42.100	224	K	Rp. 31.720	502	K	Rp. 121.050	386,15	75,55	632	K	Rp. 281.386	97,23	35,1				
2.2	Pengujian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	terdistribuskannya buku Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2019 dan Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2018	1155 Buku	K	Rp. 646.304	760 Buku	K	Rp. 127.132	760 Buku	K	Rp. 127.132	-	K	Rp. 2.751.385	49.909	K	Rp. 21.535	-	K	Rp. 21.535	-	K	Rp. 18.859	385	K	Rp. 93.044	50,66	73,18	6160	K	Rp. 220.196	53,3	34,07				
2.3	Pasilitasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM	Terselesaikannya penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	88%	K	Rp. 1.913	7 Kasus	K	Rp. 405.927	7 Kasus	K	Rp. 405.927	-	K	Rp. 206.389	2	K	Rp. 32.214	2	K	Rp. 38.970	-	K	Rp. 37.529	4	K	Rp. 315.702	57,14	77,77	11	K	Rp. 721.029	12,5	37717,8				
Rata - rata capaian kinerja (%)															164,55	75,5	Rata - rata capaian kinerja (%)															164,55	75,5				
Rata - rata capaian kinerja (%)															139,8	74,82	Rata - rata capaian kinerja (%)															139,8	74,82				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang				
Program pada Setiap SKPD															0	0	Program pada Setiap SKPD															0	0				
1	Program Pelayanan Administrasi Urutan	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja perangkat daerah	1.142,936	K	Rp. 1.142,936	0	K	Rp. 239,816	0	K	Rp. 239,816	0	K	Rp. 0	0	K	Rp. 47,86	0	K	Rp. 114,786	28,6	K	Rp. 68,977	76,46	K	Rp. 183,563	33,33	11,52	2	K	Rp. 242	33,33	2,3				
1.1	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Dokumen perencanaan dan pelaporan ; Rencana, Renja, RKPD, LKRP, Lahir/LKRP & LPPD	6 Dok	K	Rp. 10.500	-	K	Rp. 2.100	-	K	Rp. 2.100	-	K	Rp. 2	2	K	Rp. 242	-	K	Rp. 242	-	K	Rp. 242	2	K	Rp. 242	33,33	11,52	2	K	Rp. 242	33,33	2,3				
1.2	Pelatihan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Terjadinya Pelayanan Administrasi dan Laporan Keuangan	12 Bln	K	Rp. 305.348	-	K	Rp. 182,948	3	K	Rp. 40,172	3	K	Rp. 20,465	3	K	Rp. 22,935	3	K	Rp. 54,741	12	K	Rp. 138,313	100	K	Rp. 138,313	100	K	Rp. 138,313	100	K	Rp. 138,313	100	K	Rp. 45,3		
1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	- Terkelolanya sarana dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Bln	K	Rp. 827.088	-	K	Rp. 54.768	3	K	Rp. 10,750	3	K	Rp. 6,424	3	K	Rp. 13,798	3	K	Rp. 13,836	12	K	Rp. 44,808	100	K	Rp. 44,808	100	K	Rp. 44,808	100	K	Rp. 41,808	100	K	Rp. 5,42		
Rata - rata capaian kinerja (%)															77,78	56,31	Rata - rata capaian kinerja (%)															77,78	56,31				
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah	Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah				
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase hasil uji peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan kesehatan	313.843.861	K	Rp. 313.843.861	0	K	Rp. 2.239,076	0	K	Rp. 2.239,076	0	K	Rp. 0	0	K	Rp. 66,78	0	K	Rp. 1.360,311	20,9	K	Rp. 467,034	81,61	K	Rp. 1.827,344	33,33	11,52	2	K	Rp. 81,61	81,61	K	Rp. 1.827,344	0	K	Rp. 0,88
Rata - rata capaian kinerja (%)															77,78	56,31	Rata - rata capaian kinerja (%)															77,78	56,31				
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah	Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah				
2.1	Finalisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	- Terjalukannya Pengiriman unit kesehatan, Pengiriman Hibah dan Bantuan Sosial, Cermatlah Pengiriman Hibah, Pembiayaan Ganti Non PMS dan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data	12 Bln	K	Rp. 299.261.700	-	K	Rp. 5 Kgt	-	K	Rp. 226,832	1	K	Rp. 7,150	-	K	Rp. 12,950	1	K	Rp. 1.360,311	20,9	K	Rp. 160,492	5	K	Rp. 180,592	100	K	Rp. 79,61	79,61	K	Rp. 180,592	41,67	K	Rp. 0,06		

TK

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Renstra OPD)	Realisasi Kinerja Kerja Renstra OPD s/d Renstra OPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Renstra OPD yang direalisasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD yang direalisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD yang direalisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2019 (Aktifitas Pelaksanaan Renstra OPD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018 (%)	Ket																											
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	11-7-8-9-10	12-11/6-100						13-5-11	14-13/4-100																									
1			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
2.2	Prosedur Administrasi Pembangunan	- Terselesaikannya Aplikasi Sistem Pelaporan kegiatan DBHCHT - Terlaksananya Raker - Penyusunan dokumen moor kegiatan pelaksanaan moor kegiatan (PMP) - Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan Perundang Dierah - Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Bangrub - Terselesaikannya aplikasi sistem pelaporan pertambahan kegiatan OPD	-	-	12 Dok 1 Dok 1 Unit	100.000	7.231	3	10.117	-	17.685	-	42.983	6	78.016	78,02	6	78.016	0	0	0	0																									
Rata - rata capaian kinerja (%)																						82,14	87,76	Rata - rata capaian kinerja (%)																						82,14	87,76
Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi
Realisasi Kinerja																						89,58	84,2	Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi

1	Program pada Setiap SKPD	Indeks kemampuan masyarakat atas kinerja perspektif daerah	1.486.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
																							1.1	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Laporan - Terlaksananya sarana aparatur dan perlengkapan/numbuher dyan	662.941	-	12 Bhn	196.500	381.49	3	35866	3	37866	3	31.455	12	127043	93,07	12	127043	20	19,16				
1.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Pemukiman		826.810	-	12 Bhn	165.810	9.899	3	99.269	3	99.269	3	7.796	12	138.513	87,73	12	145.468	20	17,59																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	90,4	Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	90,4
Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi
Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi

2	Program pada Setiap SKPD	Indeks kemampuan masyarakat atas kinerja perspektif daerah	5.468.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
																							2.1	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran/Batang/Jasa	- Terlaksananya perencanaan dan Pengendalian Anggaran/Batang/Jasa	865.224	-	12 Bhn	183.000	40.174	3	38.270	3	56144	3	28.772	12	169.360	92,95	12	169.360	20	19,57				
2.2	Pelaksanaan Pengendalian Anggaran/Batang/Jasa	- Terlaksananya Pengendalian Anggaran/Batang/Jasa	4.603.000	-	12 Bhn	950.000	49.198	3	101.410	3	374.556	3	358.609	12	883.773	93,03	12	883.773	20	19,2																											
Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	92,79	Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	92,79
Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi
Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi

1	Program pada Setiap SKPD	Indeks kemampuan masyarakat atas kinerja perspektif daerah	423.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
																							1.1	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Tersusunnya Dokumen Lqip, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen IKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	92,36	Rata - rata capaian kinerja (%)																						100	92,36
Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Prediksi Kinerja																						Tinggi	Tinggi
Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi	Realisasi Kinerja																						Tinggi	Tinggi

FRS

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Target Realisasi OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Kinerja OPD s/d Bulan OPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2019) yang direalisasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja OPD yang direalisasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD yang direalisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rencana SKPD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran OPD s/d Tahun 2019 (%)	Ket														
						I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Administrasi Pemerintahan						Rata-rata capaian kinerja (%)										79,35		89,35																
Program Pembinaan Kelangkaan, Ketertarikan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi						Rata-rata capaian kinerja (%)										88,89		89,35																
2	Program Pembinaan Kelangkaan, Ketertarikan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Prosentase efektifitas kolaborasi perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat nilai akuntabilitas kinerja Indeks Reformasi Birokrasi meliputi pembiasaan kolaborasi, ketertarikan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi			2382,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.1	Fasilitas Kelangkaan Perangkat Daerah	- Tersedianya Kelangkaan Perangkat Daerah	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Fasilitas Ketertarikan dan Pelayanan Publik	- Tersedianya Ketertarikan dan pelayanan Publik	0	0	244,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Penyenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	- Tersedianya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Pemerintahan						Rata-rata capaian kinerja (%)										66,67		78,71																
Program Peningkatan Administrasi Umum						Rata-rata capaian kinerja (%)										77,78		83,45																
1	Program Peningkatan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atau kinerja perangkat daerah	0	0	10.236.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	0	0	1.546.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	- Tersedianya Berpas dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	0	0	8.686.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Pemerintahan						Rata-rata capaian kinerja (%)										102,33		2,29																
2	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase kelengkapan pelayanan kelembagaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0	0	2.029.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or initials.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab III ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini didanai oleh Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 yang terdiri dari 8 Program 18 Kegiatan dan prakiraan maju tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur; dan
3. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian.

II. Program Fasilitasi Tata Pemerintahan :

1. Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah; dan
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama

III. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Penegakkan HAM :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. Kegiatan Pengkajian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM; dan
4. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM (DBHCHT).

IV. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
2. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.

V. Program Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa :

1. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa;
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa; dan
3. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

VI. Program Peningkatan Perekonomian Daerah :

1. Kegiatan Pengembangan Perekonomian Daerah; dan
2. Kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD.

VII. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan :

1. Kegiatan Penyusunan Program; dan
2. Kegiatan Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

VIII. Program Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi :

1. Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Reformasi Birokrasi.

IX. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :

1. Kegiatan Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

X. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik :

1. Fasilitasi Komunikasi dan Informasi Pimpinan Daerah.

Perincian dan perbandingan antara Rencana Kerja Penetapan dengan Perubahan Rencana Kerja akan dituangkan dalam Tabel 3.1.

1/16

Tabel 3.1
Tabel Rumpusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Kudus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renc. Tahun 2020				Keterangan
			Lokas	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD TA. 2020	Lokas	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	01	01	Kab. Kudus	100%	2.500.000	-	Kab. Kudus	-	-	Bagian Pemerintahan	
		02	Kab. Kudus	100%	11.000.000	11.000.000	Kab. Kudus	100%	11.000.000	Kegiatan pindah ke Bagian Aktif Pembangunan	
		03	Kab. Kudus	100%	196.217.000	196.217.000	Kab. Kudus	100%	196.217.000		
			Bagian Tapem	1 Jenis	900.000		Bagian Pemerintahan	1 Jenis			
			Bagian Tapem	10 Unit	5.000.000		Bagian Pemerintahan	10 Unit			
			Bagian Tapem	5 Unit	25.000.000		Bagian Pemerintahan	5 Unit			
			Bagian Tapem	2 Jenis	4.400.000		Bagian Pemerintahan	2 Jenis			
			Bagian Tapem	105 OH	60.442.000		Bagian Pemerintahan	105 OH			
			Bagian Tapem	2 Org	77.500.000		Bagian Pemerintahan	1 Org		1 Orang PHD keluar	
			Bagian Tapem	20 Jenis	8.900.000		Bagian Pemerintahan	20 Jenis			
			Bagian Tapem	4 Jenis	3.000.000		Bagian Pemerintahan	4 Jenis			
			Bagian Tapem	1 Jenis	3.200.000		Bagian Pemerintahan	1 Jenis			
			Bagian Tapem	525 Dos	7.875.000		Bagian Pemerintahan	525 Dos			
4.01	4.01.03	35		100%	256.456.000			100%			
				100%				100%			

K
R
X

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020			
			Lokas	TARGET capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatf	APBD TA. 2020	Lokas	TARGET capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatf	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	01 Fasilitas Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kunjungan Kerja, Rapat kerja perangkat wilayah dan evaluasi kinerja kecamatan	Kab. Kutus	37 Kali	80.000.000	80.000.000	Kab. Kutus	37 Kali	80.000.000	
		Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja di kabupaten kutus rupaat kerja perangkat wilayah	Bagian Tepem	25 Kali	3.000.000		Bagian Pemerintahan	25 Kali		
		Evaluasi kinerja kecamatan	Bagian Tepem	3 Kali	52.000.000		Bagian Pemerintahan	3 Kali		
		Laporan SPM	Bagian Tepem	9 Kec	20.000.000		Bagian Pemerintahan	9 Kec		
		Terlaksananya Penyanggar LPPD di media massa, tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama daerah, dan dokumen LPPD	Kab. Kutus	3 Dok	176.456.000	245.561.000	Kab. Kutus	3 Dok	245.561.000	
		penyangan lppd di media massa	Bagian Tepem	2 Kali	56.000.000		Bagian Pemerintahan	2 Kali		
		Laporan pelaksanaan kerjasama daerah	Bagian Tepem	1 Dok	20.456.000		Bagian Pemerintahan	1 Dok		
		Dokumen LPPD	Bagian Tepem	1 Dok	100.000.000		Bagian Pemerintahan	1 Dok		
		Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban					Bagian Pemerintahan	1 Dok		Sub Kegiatan baru pindahan dari Bappeda
4	01	4.01.03	07	Program Pelayanan Administrasi dan Logistik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja perangkat daerah	139.544.000	137.044.000	82	137.044.000	Bagian Hutum
		01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Bagian Hutum	100 %	2.500.000		100 %		
			Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dokumen LKJP, dokumen penulisan Kinerja	Bagian Hutum	12 dok	2.500.000				
			Dokumen perencanaan dan pelaporan	Bagian Hutum			Bagian Hutum			
		02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Bagian Hutum	4 orang	9.780.000	12.900.000	4 orang	12.900.000	
			Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Bagian Hutum	4 orang	9.780.000		4 orang		
			Honorarium pejabat pelaksana ke	Bagian Hutum	4 orang	9.780.000		4 orang		
			Tersedianya Sarpras dan Peningkatan kapasitas aparatur	Bagian Hutum	100 %	127.264.000	124.144.000	100 %	124.144.000	
		03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Bagian Hutum	15 jenis	12.600.000	12.481.000	14 jenis	12.481.000	
			Alat Tulis Kantor	Bagian Hutum	15 jenis	12.600.000		14 jenis	12.481.000	
			Beratng cetakan dan penggunaan	Bagian Hutum	25475 lbr	6.227.000	5.175.000	21750 lbr	5.175.000	
			Buku peraturan perUuan	Bagian Hutum	60 buku	12.000.000	12.000.000	40 buku	12.000.000	
			Bahan bacaan	Bagian Hutum	2 jenis	4.285.000	4.800.000	2 jenis	4.800.000	

PK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020				Keterangan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Jasa surat menyurat	Bagian Hukum	3 jenis	1.000.000	1.000.000	Bagian Hukum	3 jenis	1.000.000				
		Makan minum pegawai dan rapat	Bagian Hukum	4 jenis	13.188.000	9.595.000	Bagian Hukum	338 org	9.595.000				
		Biaya perjalanan dinas luar daerah	Bagian Hukum	50 OH	30.000.000	24.500.000	Bagian Hukum	48 OH	24.500.000				
		Jasa pemeliharaan gedung kantor (AC, printer, mesin ketik, mesin komputer, mesin foto copy)	Bagian Hukum	18 unit	13.663.000	10.633.000	Bagian Hukum	18 unit	10.633.000				
		Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (penggantian suku cadang, ban, stnk untuk roda dua dan roda empat)	Bagian Hukum	7 unit	32.801.000	43.960.000	Bagian Hukum	7 unit	43.960.000				
		Pemeliharaan rutin/berkala mebelur (perbaikan meja dan kursi kantor)	Bagian Hukum	10 unit	1.500.000	-	-	-	-				
4	01	4.01.03	36	01	Program Penataan peraturan perUtan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Bagian Hukum	100 %	526.852.000	519.852.000	Bagian Hukum	100 %	519.852.000	
					Perentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Perda	Bagian Hukum	100 %			Bagian Hukum	100 %		
					Perentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	Bagian Hukum	100 %			Bagian Hukum	100 %		
					Terfasilitasnya penyusunan Rancangan Produk Hukum	Bagian Hukum	130 draft	167.000.000	160.000.000	Bagian Hukum	130 draft	160.000.000	
					Jumlah rancangan produk hukum yang tersusun	Bagian Hukum	130 draft	167.000.000	160.000.000	Bagian Hukum	130 draft	160.000.000	
					Terdistribusikannya buku Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Bupati	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	159.852.000	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	
					Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Bupati	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	159.852.000	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	
					Terfasilitasnya Penanganan Perkara Pemda dan Pelaporan RANHAM	Bagian Hukum	100 %	205.927.000	205.927.000	Bagian Hukum	100 %	205.927.000	
					Prosentase tertanganinya perkara Pemda	Bagian Hukum	100 %	185.927.000	185.927.000	Bagian Hukum	100 %	185.927.000	
					Jumlah dokumen Rantam yang diinputkan	Bagian Hukum	2 dokumen	20.000.000	20.000.000	Bagian Hukum	2 dokumen	20.000.000	
					Terlaksananya Sosialisasi peraturan perUtan bidang cukai	Bagian Hukum	9 kali	200.000.000	200.000.000	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000	
					Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perUtan bidang cukai	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000	200.000.000	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000	
					04 Fasilitas penanganan masalah hukum dan penegakan HAM (DB/CHT)								

X
16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rerja Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah							233.568.000	Bagian Kesra	
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kerja	Kab. Kudus	6 Dok	2.100.000					Kegiatan pindah ke Bagian Administrasi Pembangunan	
		Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, RKPJ, LKPD, LKSP/LKJP & LPPD	Kab. Kudus	6 Dok	2.100.000						
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	96 OB	27.600.000	27.600.000	Kab. Kudus	100%	27.600.000		
		Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan			27.600.000		Bag. Kesra	9 OPE	27.600.000		
		Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan									
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarpras dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Kudus	100%	206.068.000	206.068.000	Kab. Kudus	100%	206.018.000		
		Belanja alat tulis kantor	Bag. Kesra	32 jenis	16.331.000						
		Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	Bag. Kesra	500 Lbr	2.100.000						
		Belanja parkir kendaraan bermotor	Bag. Kesra	8 Unit	4.200.000						
		Belanja surat kabar/majalah	Bag. Kesra	12 Eksp	1.900.000						
		Belanja cetak, belanja penggantian	Bag. Kesra	2500 Lbr	2.900.000						
		Belanja makan dan minum pegawai	Bag. Kesra	3289 Gelas	9.867.000						
		Belanja makan dan minum rapat	Bag. Kesra	1007 Dos	20.130.000						
		Perjalanan dinas dalam daerah	Bag. Kesra	274 OH	23.700.000						
		Perjalanan dinas luar daerah	Bag. Kesra	110 OH	52.020.000						
		Belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Kesra	12 Kali	12.000.000						
		Belanja jasa servis kendaraan dinas	Bag. Kesra	7 Kali	13.952.000						
		Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas	Bag. Kesra	19 Bn	9.216.000						
		Belanja bahan bakar minyak	Bag. Kesra	3432 Lite	37.752.000						
		Alat Tulis Kantor				11.897.000	Bag. Kesra	32 jenis	13.847.000		
		perangko, materiail dan benda pos lainnya				1.950.000	Bag. Kesra	2 jenis	1.950.000		
		surat kabar/majalah				1.800.000	Bag. Kesra	1 jenis	1.800.000		

106

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renta Tahun 2020					Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor			8.428.000	8.428.000	Bag. Kesra	9 Unit	8.428.000		
		Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			64.466.000	64.466.000	Bag. Kesra	7 Unit	64.466.000		
		Cetak dan penggantian			18.500.000	18.500.000	Bag. Kesra	5 Jenis	18.500.000		
		Makanan dan minuman harian pegawai			19.089.000	19.089.000	Bag. Kesra	16 Org	19.089.000		
		Makanan dan minuman rapat			23.850.000	23.850.000	Bag. Kesra	1.327 Org	23.850.000		
		Perjalanan dinas dalam daerah			19.500.000	19.500.000	Bag. Kesra	220 OH	19.500.000		
		Perjalanan dinas luar daerah			36.588.000	36.588.000	Bag. Kesra	61 OH	36.588.000		
	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Perentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	Kab. Kudus		91.428.124.000	41.428.726.000			41.428.726.000		
4	01	4.01.03 41 01 Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	Bag. Kesra	12 Kali	88.931.594.000	38.631.794.000	Kab. Kudus	100%	38.631.794.000		
		Terfasilitasinya honor guru keagamaan, Honor tenaga pelaksana kegiatan, Operasional dan Koordinasi			88.224.000.000						
		Honor kesejahteraan guru swasta bidang keagamaan (madiri, tpa, diakonia, ipams)	Bag. Kesra	12 Kali	305.074.000						
		Fasilitasi kegiatan sosial (kesehatan, pendidikan dan sosial)									
		Tenaga kontrak	Bag. Kesra	9 Bln	86.040.000						
		Fasilitasi guru swasta bidang keagamaan	Bag. Kesra	5 Kali	249.638.000						
		Fasilitasi imam khottib mar'ot (pengurus tempel ibadah)	Bag. Kesra	2 Kali	66.842.000						
		Honorarium non PNS			37.924.200.000		Bag. Kesra	87.492 OB	37.924.200.000		
		Alat Tulis Kantor			100.270.000		Bag. Kesra	35 Jenis	100.270.000		
		Jasa kantor			3.800.000		Bag. Kesra	10 Kali	3.800.000		
		Jasa tenaga pelaksana kegiatan			79.866.000		Bag. Kesra	36 OB	79.866.000		
		Premi asuransi			6.840.000		Bag. Kesra	36 OB	6.840.000		
		Cetak dan penggantian			723.000		Bag. Kesra	1 Jenis	723.000		
		Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			24.255.000		Bag. Kesra	1 Jenis	24.255.000		
		Makanan dan minuman rapat			303.840.000		Bag. Kesra	13.505 Org	303.840.000		
		Perjalanan dinas dalam daerah			48.775.000		Bag. Kesra	551 OH	48.775.000		
		Perjalanan dinas luar daerah			71.725.000		Bag. Kesra	402 OH	71.725.000		
		Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			67.500.000		Bag. Kesra		67.500.000		

792

Kode	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020				Keterangan			
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	ABPD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
4	01	4.01.03	41	02	Facilitasi kegiatan Keagamaan	Terfasilitasinya Kegiatan pengajian selamatan dan Manaqib; Kegiatan PHBI; Kegiatan Pemberangkatan/Perumungan Ibadah Haji (PPHI) Kabupaten Kudus; Hasil rukyat, dan MTQ	Kab. Kudus	28 Kali	2.496.932.000	2.796.932.000	Kab. Kudus	100%	2.796.932.000	
					Facilitasi kegiatan hisab / rukyat	Bag. Kesra	3 Kali	45.680.000						
					Facilitasi kegiatan muzulul quran	Bag. Kesra	1 Kali	40.000.000						
					Facilitasi kegiatan haji	Bag. Kesra	2 Kali	1.640.350.000						
					Facilitasi kegiatan istro mirroj	Bag. Kesra	1 Kali	75.000.000						
					Facilitasi kegiatan selamatan	Bag. Kesra	11 Kali	170.500.000						
					Facilitasi kegiatan maulid nabi	Bag. Kesra	1 Kali	75.000.000						
					Facilitasi kegiatan 1 muharrom	Bag. Kesra	1 Kali	40.000.000						
					Facilitasi kegiatan hari sentri	Bag. Kesra	1 Kali	85.000.000						
					Facilitasi kegiatan mtq	Bag. Kesra	4 Kali	325.000.000						
					Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan	Bag. Kesra								
					Honorarium non PNS	Bag. Kesra								
					Bahan pakai habis	Bag. Kesra								
					Jasa kantor (dekorasi, dokumentasi dan publikasi) dan (piala penghargaan)	Bag. Kesra								
					Perawatan kendaraan bermotor	Bag. Kesra								
					Cetak dan pengandaan	Bag. Kesra								
					Sewa gedung/kantor/tempat	Bag. Kesra								
					Sewa sarana mobilitas darat	Bag. Kesra								
					Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	Bag. Kesra								
					Makanan dan minuman lain	Bag. Kesra								
					Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Bag. Kesra								
					Perjalanan dinas luar daerah	Bag. Kesra								
					Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Bag. Kesra								
					Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Bag. Kesra								

Y
K

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rerja Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	TARGET capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	TARGET capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	01 4.01.03 07	Program Pelayanan Administrasi Umum		82%	145.420.000	135.000.000		82%	135.000.000	Bagian Perencanaan	
4	01 4.01.03 07 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab Kudus	1 dok	16.300.000	16.300.000	Kab Kudus	1 dok	16.300.000		
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang terusun sesuai standar		6 dok				6 dok			
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar									
		Jumlah Pelaporan Kegiatan/Ketangolaan						6 orang			
4	01 4.01.03 07 03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab Kudus	16 dok	129.120.000	118.700.000	Kab Kudus	12 dok	118.700.000		
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terusun sesuai ketentuan		60 dok				12 dok			
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang terusun sesuai ketentuan									
		Jumlah ASN yang kompeten		9 org				8 org			
4	01 4.01.03 38	Program Pengelolaan Perencanaan dan Administrasi Pemerintahan		80%	200.000.000						
		Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		6%							
		Prosentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu		87%							
4	01 4.01.03 38 01	Pengelolaan Perencanaan Daerah	Kab Kudus	11 Dok	120.000.000						
		Jumlah dokumen pelaporan Ekuitas, TPID dan TPAKD		12 Dok							
		Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT									
		Jumlah Perusda dengan hasil Audit WTP		3 Perusda							
4	01 4.01.03 38 02	Pengelolaan administrasi Pembangunan	Kab Kudus	12 Dok	80.000.000						
		Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan dan keuangan PD									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Bangguh		1 Dok							
		Tersebutnya Aplikasi Sistem Pelaporan Perkembangan Kegiatan OPD		1 Unit							
4	01 4.01.03 37	Program Peningkatan Perencanaan Daerah		81%	110.000.000						
		Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		6%							
4	01 4.01.03 37 01	Pengembangan Perencanaan Daerah									
		Jumlah dokumen pelaporan Ekuitas, TPID dan TPAKD		11 Dok	80.000.000						
		Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT		12 Dok							

Handwritten signature or initials.

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Rerja Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APRD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4 01 4.01.03 37 02	Pemeliharaan BUKM BUD	Jumlah Perusda dengan hasil Audit WTP						5 Perusda	30.000.000	
4 01 4.01.03 07 02	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah				100.000.000	Bagan Administrasi Pembangunan	83	100.000.000	Bagan Administrasi Pembangunan
4 01 4.01.03 07 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD				16.000.000		7,00 Dok	16.000.000	
		Terdapatnya honorarium PNS pengelola kegiatan/keuangan PD						6,00 Orng		
						84.000.000		12 Dok	84.000.000	
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terakumulasi setiap tahun						12 Dok		
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terakumulasi setiap tahun						12 Dok		
4 01 4.01.03 45	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur						14 Jenis		
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang tersedia								
		Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Renja, RKP-D dan KUA PPAS Setda)				120.000.000	Bagan Administrasi Pembangunan	100%	120.000.000	
		Persentase penyusunan program pembangunan daerah yang tepat waktu						100%		
		Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu						100%		
		Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Renja, RKP-D dan KUA PPAS Setda)				40.000.000		4,00 Dok	40.000.000	
		Jumlah dokumen program pembangunan daerah						1,00 Dok		

80k

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Rencan Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	02 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan PD				80.000,000		12,00 Dok	80.000,000	
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan BarGub						1,00 Dok		
		Jumlah dokumen LK/Lit/SAKIP, LPPD, LKPJ Sekda						3,00 Dok		
4	01 4.01.03 07 02 Program pelayanan administrasi umum	Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kutubus	82%	295.239.000	379.880.000				Bagian PBJ
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kutubus	12 Bn	131.239.000	136.500.000				
		Alat tulis kantor		41 Jenis						
		Bahan bacaan dan peralatan		24 Eksp						
		Pertanggung-jawaban		6 Jenis						
		Barang cekahan dan perlengkapan		4 Org						
		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan dan lembur rahn PNS		380 Jnr						
		Kas sirat mengurut		4180 Org						
		Makanan minuman pegawai dan rapat		74 Kwh						
		Rapat								
		Rapat rapat koordinasi dan biaya perjalanan dinas								
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kutubus	21 Orang	164.000.000	243.350.000				
		Biaya servis dan perbaikan		19 Unit						
		Biaya servis dan perbaikan		10 Kali						
		Biaya servis dan perbaikan		6 Org						
		Biaya servis dan perbaikan		6 Unit						
		Biaya servis dan perbaikan		6 Unit						
		Biaya servis dan perbaikan		2534 Liter						
4	01 4.01.03 40 Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Perencanaan faktual proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan		100%	1.083.694	-				

Handwritten signature or mark.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Perubahan Renja Tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
4 01 4.01.03 40 01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Barang/Jasa	Kab. Kudus	12 Bln	171.694	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan TE/PA		10 Kali								
		Pengelolaan LPSE		16 Org								
		Sosialisasi pengadaan barang/jasa		5 Kali								
4 01 4.01.03 40 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Kudus	276 Pkt	912.000	-	-	-	-	-		
4 01 4.01.03 40 04	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				149.406.000	Kab. Kudus	100%	149.406.000			
		Sosialisasi pengadaan barang/jasa						5 Kali				
4 01 4.01.03 40 05	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengendalian Capacity Building				1.059.277.000	Kab. Kudus	100%	1.059.277.000			
		Capacity Building						1 paket				
4 01 4.01.03 40 06	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Kudus		341.456.000			100%	341.456.000			
		Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa						1 paket				
1	PROGRAM PADA SETIAP SKPD					320.615.000			320.615.000			
4 01 4.01.03 07 02	Program pelayanan administrasi umum					320.615.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		320.615.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
4 01 4.01.03 07 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana-prasarana aparatur	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah				320.615.000		83	320.615.000			
		Jumlah Dokumen perencanaan, penatruasan dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar						2,00 Dok				
		Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS						10,00 Org				
		Tersedianya Uang Lembur PNS dan Non PNS						20,00 Org				
2.10 4.01 4.01.03 19	KOMUNIKASI DAN HIPERMEDIKA Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik					323.170.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		323.170.000			

YJK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renc. Tahun 2020						
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TL 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
2.10	4.01	4.01.03	19	03	Fasilitas komunikasi dan informasi pimpinan daerah								
					Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media								
					Jumlah Jasa Penghargaan (Paket Lomba/ Daerah)								
					Jumlah Belanja Cetak untuk kebutuhan Kepraktolan								
					Jumlah Kandang Burung								
					Jumlah Fasilitas Komunikasi (Rapat Pimpinan/ Rapat), Coffee Morning Penerimaan dan Insan media								
					Jumlah Publikasi Media Cetak								
					Jumlah Publikasi Media Elektronik								
4					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4	01	4.01.03	07		Program pelayanan administrasi umum								
					Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah								
4	01	4.01.03	07	02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan								
					Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar								
					Tertindakannya pengelolaan kendaraan bermotor								
4	01	4.01.03	16		Program peningkatan pelayanan kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah								
					Persentase kelancaran pelayanan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
4	01	4.01.03	16	08	Peningkatan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/ wakil kepala daerah								
					Jumlah Pelayanan Kunjungan dan Pelaksanaan koordinasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah								

8
D
K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renc. Tahun 2020			Keterangan	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		82%	145.420.000					Bagian Organisasi
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	Kab. Kudus	1 dok	16.300.000					
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar	Kab. Kudus	6 dok						
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	Kab. Kudus	16 dok	129.120.000					
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	Kab. Kudus	60 dok						
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah ASN yang kompetensi	Kab. Kudus	9 org						
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		82%		140.143.000			140.143.000	
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah pengelola/kegiatan PD	Kab. Kudus			28.300.000		9 orang	28.300.000	
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah Serpras aparatur kantor yang terpelihara				111.843.000		100 kali	111.843.000	
		Jumlah perjalanan dinas dalam setahun						100 kali		
		Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		88%	735.000.000	639.200.000			639.200.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		82						
		Nilai akuntabilitas kinerja		72,5						
		Indeks Reformasi Birokrasi		74						
		cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		100%						

79x

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4 01 4.01.03 42 01	Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perUUan	Kab. Kudus	3 OPD	460.000.000	321.000.000		3 OPD	321.000.000		
		Jumlah PD yang difasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (skj) sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Kudus	7 OPD				7 OPD			
		Jumlah PD yang difasilitasi penyusunan anjlab dan evjab sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Kudus	7 OPD				7 OPD			
4 01 4.01.03 42 02	Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Kab. Kudus	3 dok	235.000.000	178.200.000			178.200.000		
		Jumlah OPD yang telah difasilitasi pelaksanaan ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik	Kab. Kudus	34 OPD				3 dok			
		Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan kategori baik (A)	Kab. Kudus	6 OPD				34 OPD			
4 01 4.01.03 42 03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Kudus	1 dok	40.000.000			6 OPD			
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan RB	Kab. Kudus								
4 01 4.01.03 42 03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Kudus			140.000.000		1 dok	140.000.000		
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan RB	Kab. Kudus								
		Jumlah dokumen LKJP dan Perjanjian Kinerja	Kab. Kudus					2 dok			
4 01 4.01.03 07	Program Pelayanan Administrasi		Bagian Umum	82%	10.555.449.000	APBD TA. 2020	Bagian Umum	82%	29.885.030.000	Bagian Umum	
4 01 4.01.03 07 02	Pelayanan Administrasi dan pelaporan Keuangan		Bagian Umum	19 Dok	1.535.004.000		Bagian Umum	189 dokumen	575.360.000		

8 PK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renja Tahun 2020			Keterangan	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS serta Honorarium Tim Pengabdian Berbagi Jasa		25 org						
		Tersedianya uang lembur PNS dan Non PNS		47 org						
4	01 4.01.03 07 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Bagian Umum	74 org	9.020.445.000		Bagian Umum		28.079.006.000	
		Tersedianya ASN/Non ASN dan outsourcing yang kompeten								
		Tersedianya pengelolaan rumah dinas		3 buah						
		Tersedianya pengelolaan kendaraan bermotor		71 unit						
		Jumlah Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Bahan Material						8 jenis		
		Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur kantor						31 Jenis		
		Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor						53 jenis		
		Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Bupati						7 Paket		
4	01 4.01.03 07 06	Pelayanan Ketertauusahaan Umum dan Kepegawatan	Bagian Umum				Bagian Umum	17 Dokumen	1.230.664.000	
		Tersusun sesuai Standar						29 Orang		
		Jumlah ASN dan PHD yang Mendapat Honor dan Uang Lembur						7 Jenis		
		Jumlah Jenis Belanja Barang Jasa Yang Tersedia (ATK, Surat Kabar/Majalah, Jasa Pengiriman, Premi Asuransi Kesehatan, Cetak, Perjalanan Dinas dan Kursus/Diklat						29 Buah		
4	01 4.01.03 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	100%	2.449.443.000					
		Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
4	01 4.01.03 16 08	Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	30.826 orang	2.449.443.000					
		Terselenggaranya fasilitasi kunjungan kerja / tamu yang diterima KDH dan wakil KDH								

7/16

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3)	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renja Tahun 2020			Keterangan (11)
			Lokasi (4)	TARGET capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (6)	APBD TA. 2020 (7)	Lokasi (8)	TARGET capaian Kinerja (9)	
		Terlaksananya hasil-hasil kegiatan protokoler KDH/Wakil KDH/yang mewakili		2.500 kali					

✓
PK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28) yang mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

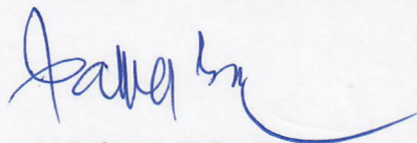
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 65

v q a





BAB IV
PENUTUP

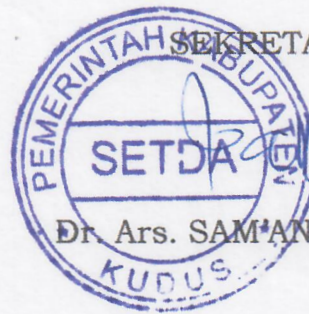
Penyusunan Perubahan Renja ini dilakukan dalam upaya mencapai target tahun 2020, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2020 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2020.

Perubahan Renja Tahun 2020 Sekretariat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan APBDP Tahun 2020.

Akhirnya seluruh unsur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Kudus, 30 Desember 2019

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO